



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**UNIT KERJA** : PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAROY

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TEUKU NOVIZAL AIYUB**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **904038**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.250.000.000**

1. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH ,  
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 171 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN  
Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH  
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 12604 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL  
SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH  
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **698.000.000**

1. MOTOR, PIAGIO SPDMOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI ,  
HADIAH , Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI CRETA STYLE 1.5 (4X2) A/T Tahun 2022,  
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI EX250(NINJA250) Tahun 2013, HASIL  
SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA NF125SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.  
3.000.000



5. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	849.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	797.391.030
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.594.391.030
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.594.391.030

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.